

GEREJA DAN TAHUN POLITIK 2024

(Tinjauan Reflektif atas Bahaya Pembangunan Pariwisata Holistik di Manggarai)

Oleh: Heribertus Solosumantro

Abstraksi

Penetapan tahun 2024 sebagai tahun politik memberi situasi yang kompleks dalam hidup masyarakat universal. Gereja sebagai komunitas iman di Manggarai turut merasakannya. Salah satu hal yang menjadi kecemasan dan kekhawatiran yang dihadapi Gereja adalah adanya permainan kepentingan elite politik dalam tubuh Gereja demi meraup suara rakyat dalam memenangkan kontestasi pada pemilihan umum 2024 nanti. Elite politik melihat bahwa tanggapan Gereja yang memaklumi pembangunan pariwisata tanpa investigasi yang mendalam adalah peluang besar untuk maju dalam pemilu 2024. Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah analisis-kritis. Penulis melihat bahwa Gereja sebagai representasi umat dan sekaligus masyarakat dalam pemerintahan mesti mendengar suara kritik masyarakat terhadap kebijakan dan praktik tindakan elite politik. Suara kritik itu dilihat sebagai bentuk utama keterlibatan Gereja dalam program pariwisata holistiknya, yakni suatu pembangunan yang menekankan partisipasi aktif, konsep budaya lokal dan keberlanjutan pembangunan yang proporsional..

Kata kunci: Gereja, Tahun Politik 2024, Pariwisata Holistik, Manggarai.

Pengantar

Penetapan tahun 2024 sebagai tahun politik memberi situasi yang kompleks dalam hidup masyarakat universal. Terdapat dua alasan yang melatarbelakangi situasi itu. Pertama, masyarakat turut merasakan kegelisahan atas perilaku wakil negeri yang cenderung bertindak atas nama kepentingan pribadi, termasuk memainkan politik pasar yang mendegradasi nilai-nilai kebaikan bersama (*bonum commune*).¹ Uniknya, penyimpangan itu justru diterima sebagai kebenaran umum dan bahkan dijadikan praktik ritual tahunan dalam kehidupan politik suatu bangsa. Hal itu terlihat jelas dalam sistem pemilihan umum, di mana para politikus memberdayakan kekuasaan dan popularitas pribadinya demi mengantongi suara massa di ruang publik.

Kedua, tak dapat dimungkiri juga bahwa dunia perpolitikan telah menyediakan ruang bagi media-media dalam mengkritisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Intervensi media dapat mengguncang dan juga sekaligus mengganggu arena politik dalam membangun demokrasi yang berkualitas, ketika ruang hidup hanya dipenuhi oleh citra-citra politik yang kering dari perbincangan politik berkualitas, dan publik hanya disuguhi oleh pencitraan politik yang dangkal, ujaran kebencian, ataupun berita-berita bohong (hoaks).²

¹Airlangga P. Kusman, "Pilpres 2024 sebagai Politik Forum" *Kompas.id* 13 Oktober 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/12/pilpres-2024-sebagai-politik-forum>, diakses pada 25 Maret 2023.
²*Ibid.*

Pada hakikatnya, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Filsuf Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai *en dam onia* atau *the good life*.³ Secara tersurat, ditemukan bahwa praktik hidup politik menyentuh dimensi-dimensi kehidupan umat manusia. Dalam bidang ekonomi, misalnya, politik menjamah sistem dan kebijakan pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan perekonomian hidup masyarakat kelas menengah ke bawah.

Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat kolektif dalam pemberdayaan sumber-sumber lokal juga menjadi bagian penting politik dalam lingkungan sosial-budaya. Dalam ruang politik itu sendiri, sistem politik memainkan peranannya dengan menetapkan wakil-wakil rakyat yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat demi pembangunan kehidupan bersama yang berkelanjutan. Hemat saya, tinjauan politik menerapkan konsep keseimbangan antara kajian ilmiah-kritis dan praktik hidup bermasyarakat dan bernegara.

Tak terlepas dari fenomena itu, Gereja Katolik Manggarai telah menetapkan tahun 2022 sebagai tahun pariwisata holistik.⁴ Gereja melihat bahwa potensi alam sebagai lokus pariwisata dapat menempatkan kehidupan masyarakat dalam konteks yang mencukupi dan lebih menjanjikan. Tentu, keputusan ini juga yang memberi ruang bagi Gereja dalam mengkritisi praktik kehidupan manusia di berbagai bidang; politik, sosial, budaya, ekonomi, dll.

Dalam sidang pastoral post Natal 4-7 Januari 2022, Keuskupan Ruteng, yang diwakili tokoh-tokoh Gereja bersama para bupati dari 3 Kabupaten di Manggarai, serta Direktur Utama Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores (BPO-LBF), menetapkan dan meresmikan tahun pariwisata holistik dalam suatu motto utama, “Berpartisipasi, Berbudaya dan Berkelanjutan”.⁵ Adapun tujuan pembangunan pariwisata holistik itu didasari oleh dokumen Gereja yakni Ajaran Sosial Gereja, *Peregrinans in Terra* dan ensiklik *Laudato Si* yang menekankan pemberdayaan pariwisata dan analisis lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terhadap keputusan atas kebijakan ini, muncul pertanyaan besar dalam diri Gereja. Apakah kebijakan Gereja Katolik Manggarai telah menempati suatu keputusan yang matang dan berdasarkan penelitian terdahulu? Apakah kebijakan itu mampu membebaskan persoalan distansi dan realitas pro-kontra pembangunan antara Pemerintah dan masyarakat Manggarai?

³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 13.

⁴Whisnu Bagus Prasetyo, “Pariwisata Holistik Manggarai Kedepankan Budaya dan Religi” *Berita Satu* Jumat, 7 Januari 2022, <https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/876079/pariwisata-holistik-manggarai-kedepankan-budaya-dan-religi>, diakses pada 25 Maret 2023.

⁵Tim Flores, “‘Pariwisata Holistik’ Keuskupan Ruteng: Antara Kata dan Perbuatan” *Floresa* 17 Februari 2022, <https://floresa.co/2022/02/17/pariwisata-holistik-keuskupan-ruteng-antara-kata-dan-perbuatan/>, diakses pada 25 Maret 2023

Apa saja jaminan yang diberikan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan Masyarakat Manggarai?

Selayang Pandang Pembangunan Pariwisata Holistik di Manggarai

Secara umum, konsep pariwisata holistik adalah pendekatan yang melibatkan keseluruhan aspek kehidupan dalam pengembangan pariwisata. Hal ini mencakup aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya, serta mengutamakan keberlanjutan dan keseimbangan antara aspek-aspek tersebut. Dalam pariwisata holistik, pengembangan pariwisata tidak hanya bertujuan untuk keuntungan ekonomi semata, tetapi juga untuk mempromosikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang.

Dalam pengembangan pariwisata holistik, tujuan yang diinginkan bukan hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, melestarikan lingkungan, dan mempromosikan kebudayaan dan tradisi lokal. Dengan kata lain, pariwisata holistik merupakan upaya untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Melihat pembangunan pariwisata holistik di Manggarai, pelaksanaan pariwisata holistik masih bertumpu dalam konteks pembangunan fisik semata. Konsentrasi pembangunan pada tempat-tempat wisata religi di Manggarai, seperti pembuatan gua, renovasi bangunan gereja-gereja tua yang bersejarah dan pembangunan gereja baru, serta tempat-tempat wisata lokal belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat Manggarai dalam peningkatan kualitas kesejahteraan. Hemat saya, konsep pariwisata holistik itu masih berjalan dalam tataran teori, tanpa adanya praksis. Hal ini justru memperkeruh daya kritis masyarakat dan sebagai akibat tindakan mengalihfungsikan kekayaan alam yang telah terberi secara tidak bertanggung jawab.

Kajian pariwisata holistik di Manggarai menuai problem pro-kontra yang berlarut antara masyarakat dan Gereja yang berpihak kepada Pemerintah. Situasi perombakan dan pembabatan hutan Bowosie untuk kepentingan bisnis dan tempat hiburan di Labuan Bajo telah menelan hak penduduk lokal atas tanah dan sebagai korban atas kepentingan para elite kekuasaan. Kondisi ini amat miris dan riskan, sebab Gereja justru mengutamakan kepentingan investor daripada hak penduduk lokal yang telah berdiam lama dan bahkan telah melekat erat dengan pemukiman mereka. Selain itu, dampak kelanjutannya, perekonomian penduduk lokal dan masyarakat kelas menengah ke bawah merasa tersingkir oleh kekuasaan investor yang nota bene mendominasi dan memiliki kemajuan teknologi yang mumpuni.

Selain itu, situasi pembangunan geothermal Wae Sano dan Poco Leok turut meluluhkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan Gereja dan Pemerintah sebagai pemimpin yang mengakomodasi kepentingan masyarakat. Bahwasannya demokrasi yang dibangun dalam ruang publik mesti selalu didahului oleh kedaulatan rakyat yang menjadi prioritas investasi pembangunan itu sendiri. Masyarakat merasa dibohongi oleh sistem demokrasi yang menjanjikan adanya jaminan dalam hak dan nilai kemanusiaan universal yang diundang-undangkan.

Dalam bidang sosial-budaya, eksistensi pariwisata holistik di wilayah-wilayah pelosok belum mendapat perhatian yang maksimal dari Gereja maupun pemerintah daerah. Semisal, akses jalan menuju beberapa daerah wisata di Manggarai Timur amat prihatin dan kurang mengesankan. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi pariwisata di Labuan Bajo yang semakin kompleks, bahkan menjangkau dunia internasional. Tentu, melihat fakta empirik ini, persoalan egoisme pembangunan karena faktor konflik kepentingan masih kuat melingkari pembangunan pariwisata, dan bukan karena perdebatan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Politik Pasar dalam Ruang Perpolitikan di Manggarai

Merunut sejarah, Indonesia telah menetapkan demokrasi sebagai salah satu ideologi politik yang dipakai hingga saat ini. Demokrasi dalam pandangan rakyat Indonesia merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Meskipun demikian kedaulatan rakyat mempercayakan wakil-wakil rakyat sebagai pemimpin yang mewakili suara seluruh rakyat Indonesia, demi keberlangsungan pembangunan yang menyangkut hidup orang banyak.

Pada tataran yang kompleks, politik memberikan gambaran kekuasaan dalam sistem pemerintahan rakyat. Relasi kuasa yang dibangun adalah yang memerintah dan yang diperintah. Politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*), dan kebijakan publik (*public policy*).⁶

Secara umum, gambaran ruang politik di Manggarai adalah situasi pemerintahan yang menautkan politik pasar sebagai ajang dalam merebut “hati” rakyat dan sekaligus memenangkan kontestan atau politikus dalam sistem pemilihan umum (pemilu). Pemilu itu dilaksanakan sekali dalam lima tahun, dan bertendesi menentukan pemimpin yang sekadar

⁶Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 14.
LA'AT NATAS TAHUN XIII/JUNI 2023

berorientasi pada politik balas jasa atau politik pasar.⁷ Politik pasar merupakan suatu aktivitas politik yang mengedepankan pertukaran barang atau jasa demi kepentingan politikus atau partai politik dalam rancangan kepemimpinan selama lima tahun ke depannya.

Praktik politik pasar di Manggarai terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi, para politisi seringkali memainkan peranan investor untuk mendanai pencalonan anggota legislatif atau eksekutif. Pertukaran kepentingan akan terjadi manakala politikus memenangkan kontestasi dalam pemilu dan memberikan proyek khusus bagi pelaku investor yang telah mendanai selama masa kampanye atau perebutan suara rakyat.

Dalam aspek sosial, penyimpangan politik pasar oleh partai politik terjadi dalam relasi kuasa kaum kapital yang memengaruhi perkembangan derajat dan kelas sosial suatu masyarakat kolektif. Para politisi mengamini kebijakan kaum kapital untuk menaikkan biaya produksi bagi masyarakat kelas menengah, dengan maksud agar yang kaya tetap kaya, dan yang miskin semakin miskin. Dalam konteks ini, para politikus turut menciptakan kemiskinan struktural dalam kehidupan masyarakat komunal.

Lebih lanjut, aspek budaya menekankan praktik para politikus yang menggandeng wisatawan asing menjual produk-produk lokal dengan “melabelkan” nama penduduk lokal Manggarai dalam usaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Perolehan keuntungan ini pun akan dipergunakan untuk kepentingan pencalonan anggota partai politik dalam ruang legislatif atau pun eksekutif, tanpa ada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Praktik nyatanya, situasi sosial penduduk pulau Komodo yang tidak mendapat perhatian khusus, sementara elite politik mempromosikan Taman Nasional Komodo tanpa beban kepada dunia luar. Hemat saya, aktus ini adalah situasi ketidakpedulian elite politik terhadap kepentingan penduduk lokal sebagai pemilik utama kepentingan itu sendiri.

Pergerakan ruang politik yang berbasis kepentingan individual ini juga yang memengaruhi idealisme politik dan cara pandang masyarakat Manggarai terhadap kebijakan publik yang diambil oleh wakil rakyat. Kebijakan publik dalam ranah kehidupan sosial dan hukum masyarakat Manggarai adalah suatu keputusan yang sungguh-sungguh dinilai sebagai perwakilan masyarakat yang konstruktif. Sebab itu, penyimpangan dalam kebijakan publik yang memperjualbelikan kepentingan akan melengserkan kepercayaan publik terhadap elite politik atau para pemangku pemerintahan.

⁷Valerie Vezina, dkk. *Ideologi-Ideologi Politik dan Pandangan Dunia*, Penerj. Udin Juhrodin (Penerbit Jim-Zam, 2023), hlm.17-18.

Gereja dan Tahun Politik 2024

Tulisan ini tentu tidak memproposalkan agar Gereja tidak turut terlibat dalam praktik politik, apalagi tidak menyuarakan pembangunan pariwisata holistik berkelanjutan. Gereja bahkan mesti tampil terlibat aktif dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat dengan landasan kepentingan kepada hak-hak mereka yang terpinggirkan dan terdiskriminasi oleh kekuasaan. Sebab keberpihakan utama Gereja itu terletak pada mereka yang lemah dan tidak berdaya, atau dalam seruannya yang mengglobal, *option for the poor*. *Option for the poor* dalam pandangan Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Laborem Exercens* pada tahun 1981 menempatkan keadilan sosial sebagai puncak dari perjuangan Gereja terhadap mereka yang miskin dan tertindas dalam relasi kuasa yang terjadi dalam elite pemerintahan.⁸

Salah satu hal yang menjadi kecemasan dan kekhawatiran yang dihadapi Gereja dewasa ini adalah adanya permainan kepentingan elite politik dalam tubuh Gereja demi meraup suara rakyat dalam memenangkan kontestasi pada pemilihan umum 2024 nanti. Elite politik melihat bahwa tanggapan Gereja yang memaklumi pembangunan pariwisata tanpa investigasi yang mendalam adalah peluang besar untuk maju dalam pemilu 2024. Selain itu, gejala ini juga dilihat dari gencaran elite politik yang memainkan praktik politik pasar dalam pembangunan pariwisata holistik di Manggarai yang menyimpang dari tujuan kebahagiaan hidup bersama. Alih-alih memberdayakan, pembangunan pariwisata Golo Mori yang terjadi di Labuan Bajo telah merusak bahkan menggagalkan panen hasil pertanian yang berada di sekitar kawasan pembangunan.⁹ Gereja membutuhkan pertimbangan holistik lebih lanjut dalam mempertanggungjawabkan hak dan kepentingan masyarakat Manggarai yang telah direnggut.

Penyimpangan elite politik yang tidak hanya memainkan politik pasar untuk menindaklanjuti kepentingan individual tetapi juga kekuasaan untuk melengserkan hak hidup masyarakat adalah bentuk diskriminasi yang memperlebar distansi kepentingan rakyat dan pemerintah. Kehadiran Gereja sebagai lembaga agama yang memiliki daya kritis tinggi terhadap isu-isu kemanusiaan yang destruktif amat menentukan tindakan konkrit perjuangan masyarakat lemah dan tertindas. Oleh karena itu, Gereja mesti sadar bahwa Gereja bertindak atas nama kepentingan universal manusia, bukan politikus atau partai politik semata.

⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, *Laborem Exercens*, (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1981), hlm. 10-19.

⁹ Tim Flores, "Presiden Jokowi Resmikan Jalan di Labuan Bajo yang Dibangun tanpa Ganti Rugi untuk Warga" *Floresa* 14 Maret 2023, <https://floresa.co/2023/03/14/presiden-jokowi-resmikan-jalan-di-labuan-bajo-yang-dibangun-tanpa-ganti-rugi-untuk-warga/>, diakses pada 25 Maret 2023.

Selain itu, keterlibatan utama Gereja dalam pembangunan pariwisata holistik di Manggarai adalah mendengarkan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti suara kritik masyarakat terhadap praktik dan kebijakan elite politik. Gereja semestinya tidak bungkam terhadap suara-suara rakyat yang mengkritisi segala kebijakan pemerintah atau elite politik, terlebih khusus dalam pembangunan pariwisata yang menuai kerusakan.

Bahwasannya umat juga sebagai bagian dari Gereja dan Pemerintah perlu mengamati perilaku dan tindakan elite politik menuju suatu kebijakan yang mengutamakan nilai kemanusiaan universal masyarakat di Manggarai. Hemat saya, suara Gereja dalam pembangunan pariwisata holistik di Manggarai tertanam dalam suara kritis dan perjuangan radikal umat demi mewartakan nilai-nilai kebaikan hidup bersama di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Penutup

Tujuan pembangunan pariwisata holistik itu sebenarnya amat jelas dalam motto tahun pariwisata holistik, bahwa pembangunan itu berakar dalam konsep partisipasi aktif masyarakat, konsep budaya Manggarai yang produktif, berakar dan kompleks serta keberlanjutan pembangunan yang proporsional.

Keteledoran dalam pemanfaatan salah satu aspek amat memengaruhi kualitas kajian terhadap konsep lainnya. Aktus Gereja mesti jelas; mengangkat kepentingan masyarakat universal dan sekaligus mengkritisi makna pembangunan oleh elite politik. Dalam hal ini, pembangunan fisik wisata religi dan lokal mesti dikaji kembali dalam suatu konsep yang netral dalam realitas hidup masyarakat Manggarai. Sebab, tanpa suara kritis, Gereja hanyalah “alat” bagi elite politik untuk sebuah kekuasaan tanpa batas.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Kusman, Airlangga P. “Pilpres 2024 sebagai Politik Forum” *Kompas.id*. 13 Oktober 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/12/pilpres-2024-sebagai-politik-forum>, diakses pada 25 Maret 2023.

Paulus II, Yohanes. *Laborem Exercens*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana. 1981.

Prasetyo, Whisnu Bagus. “Pariwisata Holistik Manggarai Kedepankan Budaya dan Religi” *Berita Satu*. Jumat, 7 Januari 2022. <https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/876079/pariwisata-holistik-manggarai-kedepankan-budaya-dan-religi>, diakses pada 25 Maret 2023.

Tim Floresa, “‘Pariwisata Holistik’ Keuskupan Ruteng: Antara Kata dan Perbuatan” *Floresa*. 17 Februari 2022. <https://floresa.co/2022/02/17/pariwisata-holistik-keuskupan-ruteng-antara-kata-dan-perbuatan/>, diakses pada 25 Maret 2023.

Tim Floresa, “Presiden Jokowi Resmikan Jalan di Labuan Bajo yang Dibangun tanpa Ganti Rugi untuk Warga” *Floresa*. 14 Maret 2023. <https://floresa.co/2023/03/14/presiden-jokowi-resmikan-jalan-di-labuan-bajo-yang-dibangun-tanpa-ganti-rugi-untuk-warga/>, diakses pada 25 Maret 2023.

Vezina, Valerie. dkk. *Ideologi-Ideologi Politik dan Pandangan Dunia*. Penerj. Udin Juhrocin. Penerbit Jim-Zam. 2023.